



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/MK/2024
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88
		1b-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1c-CP Indeks integritas organisasi	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
		2b-N Tingkat Penguatan Local Taxing Power	70%
		2c-N Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a-N Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%
		3b-N Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23
		3c-N Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%
		4b-N Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
5	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	5a-CP Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
		5b-CP Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
6	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%
		6b-CP Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
7	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	7a-CP Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		7b-CP Nilai Evaluasi Organisasi	100

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		7c-N Persentase Penyelesaian IS Program RBTK dan Data Analytics	94%
8	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	8a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100
		8b-CP Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10
9	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi	9a-CP Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%
		9b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

1. Program Kebijakan Fiskal	<i>Rp</i>	6.500.705.000
Output Program: Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	<i>Rp</i>	6.500.705.000
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	<i>Rp</i>	6.500.705.000
2. Program Pengelolaan Belanja Negara	<i>Rp</i>	23.352.198.000
Output Program: Alokasi Belanja pemerintah pusat dan TKD	<i>Rp</i>	18.723.973.000
a. Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi	<i>Rp</i>	14.051.417.000
b. Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKD	<i>Rp</i>	532.406.000
c. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	<i>Rp</i>	2.476.280.000
d. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	<i>Rp</i>	1.663.870.000
Output Program: Penganggaran Berbasis Kinerja di K/L dan Pemda	<i>Rp</i>	4.628.225.000
a. Komunikasi. Edukasi. dan Standardisasi	<i>Rp</i>	3.466.225.000
b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pusat dan TKD	<i>Rp</i>	738.000.000
c. Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKD	<i>Rp</i>	424.000.000
3. Program Dukungan Manajemen	<i>Rp</i>	40.270.916.000
Output Program: Tata Kelola Organisasi dan Sumber Daya Manusia	<i>Rp</i>	32.317.643.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum (DJPK)	<i>Rp</i>	24.783.343.000
b. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik (DJPK)	<i>Rp</i>	755.583.000
c. Pengelolaan Organisasi dan SDM (DJPK)	<i>Rp</i>	6.564.664.000
d. Legislasi dan Litigasi	<i>Rp</i>	214.053.000
Output Program: Sistem Teknologi Informasi Keuangan	<i>Rp</i>	7.873.273.000
a. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi (DJPK)	<i>Rp</i>	7.873.273.000
Output Program: Sistem Pengendalian dan Pengawasan Institusi	<i>Rp</i>	80.000.000
a. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal (DJPK)	<i>Rp</i>	80.000.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Menteri Keuangan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88
1b-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1c-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
2b-N	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	-	30%	30%	-	-	70%	70%
2c-N	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-N	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,94%	34,94%
3b-N	Indeks ketimpangan antarwilayah	-	-	-	-	-	0,23	0,23
3c-N	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	-	100%
4b-N	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85

Jakarta, 30 Januari 2024
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	Integrasi dan Konektivitas Data Keuangan Desa	<p>a. Ketersediaan data keuangan desa hingga level objek dan kegiatan termasuk sumber dana sehingga dapat dilakukan analisis dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan/kebijakan</p> <p>b. Penyempurnaan tata kelola pelaporan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa</p> <p>c. Peningkatan kualitas data keuangan Desa yang disampaikan Pemdes melalui Pemda</p>	Pengembangan aplikasi SIKD Teman Desa (sisTEM inforMasi keuangan DESA) sebagai tools dalam penyampaian data keuangan desa	<p>a. Konektivitas antara SISKEUDES dan SIKD Teman Desa untuk data terkait pengelolaan keuangan Desa.</p> <p>b. Kerja sama lintas stakeholders Kementerian/ Lembaga dalam rangka pertukaran, pemanfaatan, dan sosialisasi bersama untuk Data Keuangan Desa</p> <p>c. Tata kelola pelaporan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa</p>	2024-2026	Dit. DDIOKK Dit. SIPT	Rp50.000.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN : 1 JANUARI SD 31
DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Luky Alfirman	1	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
2	NIP	197003271995031002	2	NIP	-
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama, IV/e	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	-
4	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	4	JABATAN	Menteri Keuangan
5	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	5	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

A. UTAMA

1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	Penerima Layanan
2.		Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	Penerima Layanan
3.		Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan
4.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	Penerima Layanan
5.		Tingkat Penguatan Local Taxing Power	70%	Penerima Layanan
6.		Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	75%	Penerima Layanan
7.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	34,94%	Penerima Layanan
8.		Indeks ketimpangan antarwilayah	0,23	Penerima Layanan
9.		Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	78	Penerima Layanan
10.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan
11.		Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	Proses Bisnis
12.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja	100%	Proses Bisnis

HASIL KERJA				
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(Penugasan dari Menteri Keuangan)	Pemerintah Pusat dan TKD		
13.		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
14.	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	Proses Bisnis
15.		Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100	Proses Bisnis
16.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.		Nilai Evaluasi Organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
18.		Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	94%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10	Penguatan Internal atau Anggaran
21.	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
22.		Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA				
1	Berorientasi pelayanan			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 		<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>	

PERILAKU KERJA		
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berededikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati
-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	531 pegawai pada unit							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1.	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88
2.	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100 %	100 %
3.	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
4.	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
5.	Tingkat Penguatan Local Taxing Power	-	30%	30%	-	-	70%	70%
6.	Tingkat Implementasi Kebijakan Pembiayaan dan investasi Daerah	-	-	-	50%	50%	75%	75%
7.	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	34,9 4%	34,9 4%
8.	Indeks ketimpangan antarwilayah	-	-	-	-	-	0,23	0,23
9.	Indeks Kualitas Pengelola Keuangan Daerah	-	78	78	-	-	78	78
10.	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100 %	100 %
11.	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85
12.	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja	-	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

	Pemerintah Pusat dan TKD							
13.	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
14.	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	91%	91%
15.	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
16.	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
17.	Nilai Evaluasi Organisasi	-	-	-	-	-	100	100
18.	Persentase Implementasi Inisiatif Strategis RBTK dan Data Analytics	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
19.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
20.	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
21.	Tingkat kualitas pengelolaan TIK	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
22.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai

Jakarta, 30 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja

Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002

Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

-